Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Difaf SausanAqilla^{1*}, Sany Dwita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: aqillads25@gmail.com

Tanggal Masuk:

30 Agustus 2024

Tanggal Revisi:

23 Mei 2025

Tanggal Diterima:

18 Agustus 2025

Keywords: *Accounting Fraud Tendencies; Assymmetric Information; Internal Control.*

How to cite (APA 6th style)

Aqilla, D. S., & Dwita, Sany. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (3), 1284-1296.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2220>

This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to examine the effect of intenal control and assymmetric information on the tendency of accounting fraud in the Regional Apparatus Organization (OPD) of Tanah Datar Regency. The sampling method used is purposive sampling with a total of 72 respondents consisting the head of OPD, the head of accounting and finance department, and the staff of accounting and finance department of each OPD. The source of data in this study are primary data and data collection techniques using a questionnaire. The result of this study indicates that (1) intenal control has a negative effect on the tendency of accounting fraud in the Regional Apparatus Organizaion (OPD) of Tanah Datar Regency, and (2) assymmetric information has a positive effect on the tendency of accounting fraud in the Regional Apparatus Organizaion (OPD) of Tanah Datar Regency.

PENDAHULUAN

Keberhasilan penerapan *good governance* di Indonesia didorong oleh pelaksanaan otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah (Pratolo, 2008). Salah satu bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah ini diwujudkan dengan adanya desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU no. 32/2004 dan UU no. 33/2004 sebagai revisi UU no. 22 dan 24 tahun 1999. Kebijakan desentralisasi fiskal ini berdampak terhadap adanya pelimpahan wewenang yang semakin luas kepada pemerintah daerah dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah serta memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri keuangan daerahnya (Anan, 2022). Faktanya, hal ini justru menyebabkan praktik *fraud* seperti penyalahgunaan aset, *fraud* atas laporan keuangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga menyebar ke pemerintah daerah (Puspasari dan Suwardi, 2016).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yaitu organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia yang menyediakan pelatihan dan edukasi mengenai *fraud*, mengelompokkan kecurangan akuntansi ke dalam tiga kelompok, diantaranya adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan

praktik korupsi. ACFE telah melakukan survei terbaru bertajuk “A Report To The Nations” terkait kasus kecurangan (*fraud*) pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan skema yang paling umum terjadi di berbagai negara secara global (ACFE, 2022). Rovviudrajat (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa bentuk fraud yang sering terjadi pada sektor publik atau pemerintahan adalah korupsi, baik itu dalam jenis gratifikasi maupun penyuaipan serta bentuk lainnya yang dilakukan demi mencapai keuntungan pihak-pihak yang melakukan *fraud*.

Transparency International merilis *Corruption Perception Index* (CPI) yang merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun pengukuran 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Angka ini naik satu poin dibandingkan tahun 2020 dengan skor 37/100. Sedangkan untuk tahun pengukuran 2022, CPI Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu 34/100 dimana angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan membuktikan bahwa kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun (*Transparency International, 2023*).

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah daerah yang dijuluki sebagai Luhak Nan Tuo, dimana Kabupaten Tanah Datar mempunyai aneka cagar budaya dimulai dari cagar budaya pra sejarah, Hindu-Budha, Islam, Kolonial, kependudukan Jepang, pascakemerdekaan hingga tradisional (republik.co.id). Hal ini membuat Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah yang sangat menarik untuk dikunjungi karena kaya akan obyek wisata sehingga dapat memberikan kontribusi pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan desentralisasi salah satunya juga didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Tanah Datar juga merupakan salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam peringkat tiga besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi di Sumatera Barat untuk tiga tahun berturut – turut untuk tahun 2018-2020. Pada tahun 2020, pencapaian realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar mencapai 99,41% dari yang ditargetkan (BPK RI, 2021). Selanjutnya, tahun 2021 dan 2022 realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 106,84% dan 113,30% dari target yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan. Saputra & Mahmudi (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya korupsi (*fraud*) dan hal ini memberikan indikasi bahwa PAD rentan untuk menjadi objek korupsi (*fraud*) di daerah.

Kemudian, masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar tahun 2020 telah berhasil memasukan dana ke kas negara sebesar Rp 491.059.000, - yang diperoleh dari uang Rampasan kasus OTT (Operasi tangkap tangan) mantan kepala dinas koperindag Tanah Datar sebesar Rp 20 juta beserta uang denda Rp 100 juta. Kemudian uang sebesar Rp.121.095.000,- atas kasus korupsi oleh mantan wali nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar dalam kasus transfer dana vinus beserta denda Rp 50 juta dan kasus mantan direktur Pursda Tuah Sepakat Tanah Datar yang juga membayar denda sebesar Rp 200 juta (Jurnal Sumbar, 2020). Selanjutnya, kasus korupsi oleh dua perangkat Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 yang diituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar. Berdasarkan

laporan hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp600 juta dimana jumlah tersebut merupakan total dari dana SPP yang dikeluarkan untuk pembelian aset yang hak miliknya tidak diperoleh oleh Negara (BPK RI, 2021).

Salah satu faktor yang dianggap sebagai alat ampuh dalam mencegah terjadinya *fraud* adalah pengendalian internal (*internal control*). Riset terdahulu yang dilakukan oleh Holmes et al. (2000) mengidentifikasi dan memberikan gambaran, penilaian, serta analisis terhadap kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor publik dan dan sektor swasta. Penelitian ini menjelaskan bahwa kecurangan yang timbul di kedua sektor tersebut salah satunya disebabkan oleh penerapan pengendalian internal (*internal control*) yang masih dianggap lemah. Kelemahan atas pengendalian ini terutama dapat dilihat melalui lemahnya sikap organisasi. Giriūnas dan Mackevičius (2014) dalam penelitiannya yang mengevaluasi kecurangan (*fraud*) di sektor publik juga menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal (*internal control*) di sektor publik menciptakan kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam jumlah yang besar. Adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisir perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi dalam instansi atau lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri (Shintadevi, 2015).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam perusahaan yang mengetahui informasi lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*) (Apriana & Ayu, 2021). Lestari & Supadmi (2017) mengatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Saftarini et al. (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat asimetri yang terjadi, maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika asimetri informasi antara pihak penyedia dan pengguna rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansinya semakin rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar)”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang pertama kali dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) ini menjelaskan hubungan kerja sama berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pihak agen dan prinsipal, pada hal ini prinsipal menunjuk orang lain sebagai agen dalam melakukan jasa untuk kepentingan prinsipal seperti pendelegasian kekuasaan dalam pembuatan keputusan. Perbedaan fungsi antara prinsipal dan agen cenderung dapat menimbulkan sesuatu yang disebut sebagai *agency problem* atau konflik kepentingan. Ketika kepentingan salah satu pihak terganggu kesempatannya untuk terpenuhi maka ada kemungkinan bagi mereka untuk berperilaku menyimpang.

Sebagai konsep universal teori keagenan tidak hanya dapat diimplementasikan pada sektor privat, tetapi juga pada sektor publik (Didi & Kusuma, 2018). Halim & Abdullah (2006) menyatakan bahwa pemerintahan atau sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan dimana terdapat hubungan keagenan dan masalah keagenan. Hubungan keagenan di sektor publik memandang bahwa masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah berperan sebagai agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain) dan sebagai wujud

pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso & Pambelum, 2008). Adanya ketidaktahuan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi), maka hal ini dapat menyebabkan agen cenderung untuk melakukan berbagai bentuk kecurangan.

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan dalam lingkup akuntansi didefinisikan sebagai adanya tindakan, kebijakan, kecurangan, menyembunyikan, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja dalam hal penyajian laporan keuangan dan pengelolaan aset suatu instansi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan (Novikasari, 2017). Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kecurangan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

Jenis – jenis kecurangan menyangkut dua kategori utama, yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset (Arens et al, 2008). Pelaporan keuangan yang curang ini didefinisikan sebagai salah saji atau pengabaian jumlah ataupun pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan, sedangkan penyalahgunaan/misapropriasi aset diartikan sebagai kecurangan yang melibatkan pencurian aset dan melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaraannya (Arens et al, 2006).

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) dalam Randiza (2016) menjelaskan terdapat lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan kemudian diimplementasikan untuk memberikan kepastian bahwa tujuan pengendalian tersebut akan tercapai, yang meliputi: (1) Lingkungan Pengendalian (*Contol Environment*), (2) Penilaian risiko (*Risk Assessment*), (3) Aktivitas pengendalian (*Control Activity*), (4) Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*), dan (5) Pemantauan (*Monitoring*).

Asimteri Informasi

Dewi & Rani (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa asimetri informasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan pada suatu instansi. Asimetri informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (Samanto & Setyaningsih, 2020).

Asimetri informasi terbagi menjadi 2 bentuk seperti yang dijelaskan oleh Scott (2003:7-8) dalam Randiza (2016), diantaranya yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse Selection* ini dapat dikatakan sebagai jenis asimetri informasi dimana terdapat kepemilikan informasi yang lebih oleh pihak – pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial atas pihak-pihak lain, sedangkan *moral hazard* merupakan pemanfaatan atas ketidaktahuan pihak lain untuk

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan akhirnya dapat merugikan pihak lain.

Kerangka Konseptual

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa aspek pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Efektifitas pengendalian internal yang tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya tendensi untuk melakukan kecurangan, sebaliknya efektifitas pengendalian internal yang rendah akan menyebabkan semakin besarnya tendensi untuk berbuat kecurangan. Lestari & Supadami (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukannya dan peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Sanuari (2016) juga menjelaskan jika pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan jika pegawai melakukan tugasnya dengan baik, maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi diri dari kecurangan.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saftarini et al. (2015), Eliza (2015) serta Muna & Harris (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nilai negatif ini menunjukkan pengaruh berlawanan arah yang berarti bahwa semakin tinggi efektifitas sistem pengendalian internal maka semakin rendah kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori keagenan bermaksud memecahkan *problem* yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah *problem* yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimana yang akan datang dibandingkan *principal* dan *stakeholder* lainnya (Downida, 2017). Adanya asimetri informasi antara pimpinan sebagai agen dan pemilik menyebabkan timbulnya kesenjangan pengetahuan keuangan internal sehingga pihak pimpinan bisa melakukan rekayasa dalam upaya meningkatkan keuntungan untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik (Bestari, 2016).

Penelitian terdahulu terkait asimetri informasi dilakukan Indriastuti et al. (2016), Muna & Harris (2018) dan Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa asimetri informasi

memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketika asimetri informasi yang terjadi tinggi, maka tingkat kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian survey. Data penelitian bersumber dari data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Sudah bekerja di organisasi tersebut minimal 1 tahun, karena dianggap telah mengetahui dan memahami SPIP di organisasi tempatnya bekerja.
- b) Responden dalam penelitian ini adalah kepala OPD, Kabag Akuntansi dan Keuangan serta Staf bagian Akuntansi dan Keuangan.

Penelitian ini pada 24 OPD di Kabupaten Tanah Datar. Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu pimpinan OPD, pimpinan bagian akuntansi dan staf akuntansi terkait dari masing - masing OPD tersebut, sehingga total sampel pada penelitian ini berjumlah 72 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas Pengendalian Internal

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
PI 1	0,790	0,00	Valid
PI 2	0,795	0,00	Valid
PI 3	0.848	0,00	Valid
P1 4	0,776	0,00	Valid
PI 5	0,767	0,00	Valid

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel 2
Uji Validitas Asimetri Informasi

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
AI 1	0,671	0,00	Valid
AI 2	0,709	0,00	Valid
AI 3	0.600	0,00	Valid
A1 4	0,558	0,00	Valid
AI 5	0,665	0,00	Valid
AI 6	0,766	0,00	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel 3
Uji Validitas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
KKA 1	0,760	0,00	Valid
KKA 2	0,836	0,00	Valid
KKA 3	0,820	0,00	Valid
KKA 4	0,694	0,00	Valid
KKA 5	0,682	0,00	Valid
KKA 6	0,601	0,00	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Uji validitas pada tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa seluruh koefisien korelasi untuk variabel pengendalian internal (X1), asimetri informasi (X2) dan kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) pada penelitian ini lebih besar dari 0,229 sehingga dapat dikatakan semua instrumen valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	5	0,847	Reliabel
X2	6	0,738	Reliabel
Y	6	0,810	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel penelitian tersebut >0,60 atau mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel-variabel penelitian tersebut reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		72
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,55480183
Most Extreme Differences	Absolute	0,052
	Positive	0,52
	Negative	-0,031
Test Statistic		0,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c, d}

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi dari hasil uji normalitas sebesar $0.200 > 0,05$, yang artinya data dalam penelitian ini nilai residual terdistribusi dengan normal sehingga model dapat dilanjutkan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.104	4.286		3.290	.002		
Pengendalian Internal	-.450	.168	-.289	-2.689	.009	1.000	1.000
Asimetri Informasi	.563	.170	.355	3.310	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel pengendalian internal dan asimetri informasi masing-masing sebesar 0,933, 0,930, 0,996. Nilai *tolerance* yang diperoleh masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,1. Nilai VIF untuk variabel pengendalian internal dan asimetri informasi masing-masing sebesar 1,074, 1,075, 1,004. Nilai VIF pada masing-masing variabel ini lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2.130	2.586		.823	.413
Pengendalian Internal	-.071	.101	-.083	-.705	.483
Asimetri Informasi	.159	.103	.183	1.555	.125

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen yaitu pengendalian internal sebesar 0,483 dan asimetri informasi sebesar 0,125 yang memiliki nilai lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa untuk model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 8
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	14.130	4.286		3.290	.002
Pengendalian Internal	-.450	.168	-.289	-.2689	.009
Asimetri Informasi	.563	.170	.355	3.310	.001

a. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai dari masing – masing variabel dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi berganda yaitu nilai konstanta (α) sebesar 33,052, nilai koefisien regresi (b_1) sebesar -0,445 dan nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -0,509.

Uji Model

Uji Statistik F

Nilai F tabel pada level signifikansi 0,05 untuk F (2;70) adalah 3,128. Hasil pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $8,919 > 3,128$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini mempunyai arti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama, selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengendalian internal dan asimetri informasi secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,182, atau sebesar 18,2%. Perhitungan ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap variabel dependen adalah sebesar 18,2%, sedangkan 81,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Setiap variabel dikatakan

berpengaruh, apabila nilai signifikansinya $<0,05$. Hasil perhitungan diketahui nilai signifikansi untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Uji Hipotesis Pertama (H1)

Variabel pengendalian internal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,689 > 1,995$ dan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dengan nilai β sebesar $-0,450$. Hasil perhitungan statistik t ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Uji Hipotesis Kedua (H2)

Variabel asimetri informasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,310 > 1,995$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan nilai β sebesar $0,563$. Hasil perhitungan statistik t ini menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Pembahasan

Pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Hasil uji statistik dalam penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variabel pengendalian internal sebesar $-0,289$ dengan nilai t-hitung sebesar $-2,689$ pada sig. sebesar $0,009$. Koefisien standarisasi pengendalian internal ditunjukkan dengan nilai beta sebesar $-0,450$. Hal ini berarti pengaruh langsung pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah 45 persen.

Hasil pengujian membuktikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada OPD Kabupaten Tanah Datar dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak agen dan prinsipal, maka dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan agar hal – hal yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada dan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Eliza (2015), Lestari & Supadmi (2017), dan Muna & Harris (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahriati et al (2015), Apriliana & Budiarto (2018), serta Bilqisari (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan, sedangkan pengendalian internal yang efektif dapat digunakan instansi untuk melindungi dari korupsi, penggelapan, serta penyalahgunaan aset. Oleh sebab itu, apabila pengendalian internal dilaksanakan secara efektif maka dapat diandalkan sebagai alat untuk melindungi dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahriati et al. (2015), Apriliana & Budiarto (2018), serta Masita (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal terkadang dibuat semata-mata hanya sebagai formalitas, namun tidak dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh individu di dalam instansi, sehingga nantinya timbul kecenderungan untuk bertindak curang dan pada akhirnya akan merugikan instansi itu sendiri. Kesimpulannya, semakin tinggi atau baik suatu pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi dapat dihindarkan.

Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar dapat mendorong terjadinya kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya konflik antara pihak instansi yang berperan sebagai agen dengan pihak luar/masyarakat yang berperan sebagai prinsipal. Pihak instansi dapat memanfaatkan informasi yang mereka peroleh tanpa sepengetahuan pihak luar untuk kepentingannya sendiri. Tindak kecurangan dalam instansi dapat dihindari apabila asimetri informasi atau kesenjangan informasi yang terjadi kecil, sehingga pemberian informasi harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi pemanfaatan atas informasi tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Lestari & Supadmi (2017), Muna & Harris (2018) dan Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori keagenan yang menjelaskan permasalahan yang terjadi akibat adanya kesenjangan informasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pihak instansi sebagai agen. Teori keagenan ini beranggapan bahwa terjadinya asimetri informasi disebabkan oleh pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Asimetri informasi yang terjadi akan mendorong staf/pegawai instansi tersebut untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terlebih lagi jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri Informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Keterbatasan

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: (1) Penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel saja, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat diteliti terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi baik itu faktor organisasional maupun faktor individual, (2) Data pada penelitian ini dijangkau menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, dan peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat terhadap pengisian jawaban responden, sehingga jawaban kuesioner terkadang diisi secara asal-asalan oleh responden dan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan faktor baru diluar faktor pada penelitian ini. Kemudian, Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode wawancara agar hasil yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan juga memperbanyak referensi terkait faktor-faktor yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2021). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. In *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.* <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. In *Association of Certified Fraud Examiners* (Vol. 111).
- Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*, 11(1), 41–55.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S (2008). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*, Jilid 1. Edisi Keduabelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Atmoko, C. (2020). Survei: Kasus fraud dan penyelewengan aset melonjak di tengah pandemi. *Antaraneews.Com*, 1. survei: Kasus fraud dan penyelewengan aset melonjak di tengah pandemi
- Bestari, D. S. (2016). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 3(1), 1436–1447.
- Damayanti, D. N. S. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Nominal*, 5(2), 52–67.
- Dewi, P. P., & Rani, P. D. P. (2017). Moralitas Aparat, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 2(2), 318–330.
- Downida, A. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5).
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12>
- Faqih, F. (2020). Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html#:~:text=Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia%2C Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor,-ilustrasi korupsi.&text=Merdeka.com - Lemb>
- Guritno, T. (2021). ICW Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi di Tahun 2020 Meningkat 4 Kali. *Lipat Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/17391501/icw-sebut-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-tahun-2020-meningkat-4-kali?page=all>
- Holmes, S. A., Strawser, J. W., & Welch S, T.(2000). Fraud In The Governmental And Private Sectors. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 12(3), 345-369.
- Indriastuti, D. E., (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 115–130.
- Khoiriyah, L., Asyik, N. F., & Amanah, L. (2019). Dampak Locus of Control pada Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Abstrak. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 108–123.
- Komala, R., Piturungsih, E., & Firmansyah, M. (2019). *Information Asymmetry, Individual Morality and Internal Control Against Tendencies of Accounting Fraud*. 29(2), 645–657.

- Lestari, N. K. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 389–415.
- Michael C. Jensen, W. H. M. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Muna, B. N., & Harris, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.
- Novikasari, Y. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Ketaatan Aturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM Fekon*, 4(1), 1516–1530.
- Randiza, I. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Moralitas Aparat Pemerintah dan Ketaatan Aturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOMFekom*, 3(1), 1108–1122.
- Roviudrajat, T. (2022). Analisis Perilaku Fraud Dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-24.
- Saftarini, P. R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Di Kabupaten Bangli). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Samanto, H., & Setyaningsih, N. (2020). Pengaruh Pengendalian Intern , Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 43–55.
- Sanuari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Kantor Bumn Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1–16.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 16(2), 245–20.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774–1799.
- Wahyudi, A. (2020). The Effect of Asymmetric Information and Unethical Behaviour towards Tendency of Accounting Fraud in the Rural Government of Empang Sub-District , Sumbawa Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(12), 584–589.